

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional yang diarahkan untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan merata. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memegang peran strategis dalam mengelola sumber daya publik melalui proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Namun demikian, efektivitas pembangunan daerah tidak semata ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, melainkan oleh sejauh mana sistem pengelolaan anggaran mampu menghasilkan kinerja yang nyata dan terukur (OECD, 2019; PEFA, 2016).

Dalam konteks administrasi publik modern, tuntutan terhadap akuntabilitas dan transparansi mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi pendekatan *Performance-Based Budgeting* (PBB). Pendekatan ini menekankan bahwa anggaran publik harus dikaitkan secara langsung dengan output dan outcome yang dihasilkan, sehingga efektivitas pengelolaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat serapan, tetapi juga dari keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja (Andrews, 2013; Pollitt & Bouckaert, 2017). Dalam perspektif ini, penyerapan anggaran bukan sekadar indikator administratif, melainkan refleksi dari kualitas integrasi antara desain kebijakan dan implementasi program.

Meskipun secara normatif sistem penganggaran berbasis kinerja telah diadopsi secara luas, berbagai studi menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara perencanaan dan penyerapan anggaran dalam praktiknya. Fenomena ini sering dijelaskan melalui konsep *implementation gap* atau bahkan *institutional decoupling*, di mana dokumen perencanaan dan indikator kinerja formal tidak sepenuhnya mencerminkan praktik pelaksanaan di lapangan (Andrews, 2013; Meyer et al., 2008). Dengan kata lain, organisasi publik dapat menunjukkan kinerja administratif yang tinggi tanpa diikuti oleh efektivitas implementasi yang setara.

Kabupaten Bekasi sebagai salah satu wilayah strategis di Provinsi Jawa Barat menghadapi dinamika pembangunan yang kompleks, terutama dalam mengelola program prioritas daerah. Peran Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) menjadi krusial dalam memastikan keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan Dokumen RKPD Tahun 2024, alokasi anggaran pada Bappeda Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Rincian Pendanaan Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2024

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp18.465.085.256
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp5.076.371.303
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp6.221.017.667
Jumlah Total		Rp29.762.474.226

Sumber: Dokumen RKPD Kabupaten Bekasi 2024

Sebagai bagian dari upaya penguatan pengendalian pembangunan, pemerintah daerah menggunakan Indeks Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah (IKPPD) sebagai indikator utama untuk menilai efektivitas proses monitoring dan evaluasi. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa Bappeda Kabupaten Bekasi berhasil mencapai skor IKPPD sebesar 91,69 poin, melampaui target sebesar 90,85 poin (100,92%), sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Capaian Indikator Kinerja IKPPD Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	90,85	91,69	100,92%

Sumber: Bappeda Kabupaten Bekasi, 2024

Meskipun capaian IKPPD Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan, hasil evaluasi kinerja menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target. Kondisi tersebut terutama terlihat pada indikator yang berkaitan dengan integrasi perencanaan pembangunan. Tingkat Integrasi Perencanaan Daerah yang ditargetkan sebesar

100% hanya terealisasi sebesar 54,18%. Sementara itu, Tingkat Integrasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mencapai 57,72%, dan Tingkat Integrasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mencapai 71,34%.

Tabel 1. 3 Kondisi Penyerapan Anggaran Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2024

No	Komponen Anggaran	Nilai
1	Pagu Anggaran	Rp29.762.474.226
2	Realisasi Anggaran	Rp26.098.999.780
3	Sisa Anggaran	Rp3.663.474.446
4	Tingkat Penyerapan Anggaran	87,69%

Sumber: Diolah dari Data Realisasi Anggaran Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2024

Di sisi lain, tingkat penyerapan anggaran Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2024 mencapai 87,69%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah direalisasikan. Namun demikian, masih terdapat selisih antara anggaran yang direncanakan dengan anggaran yang terealisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan anggaran belum sepenuhnya optimal. Dalam perspektif *performance-based budgeting* (Špaček, 2019), penyerapan anggaran yang optimal tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh kualitas perencanaan dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tabel 1. 4 Perbandingan Integrasi Perencanaan dan Penyerapan Anggaran Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2024–2025

Indikator	2024	2025	Perubahan
Tingkat Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah	54,18%	82,87%	+28,69 poin
Integrasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	57,72%	81,75%	+24,03 poin

Indikator	2024	2025	Perubahan
Integrasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	71,34%	84,50%	+13,16 poin
Penyerapan Anggaran	87,69%	82,63%	-5,06 poin

Sumber: Diolah dari LAKIP Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2024 dan 2025.

Selanjutnya perkembangan kondisi tersebut dapat dilihat melalui perbandingan kinerja Bappeda Kabupaten Bekasi pada tahun 2024 dan 2025. Pada tahun 2025, Tingkat Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah mengalami peningkatan dari 54,18% pada tahun 2024 menjadi 82,87%, atau meningkat sebesar 28,69 poin persentase. Peningkatan juga terjadi pada Tingkat Integrasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dari 57,72% menjadi 81,75%, serta Tingkat Integrasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dari 71,34% menjadi 84,50%. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam integrasi perencanaan pembangunan pada tahun 2025.

Namun, peningkatan tersebut belum diikuti oleh peningkatan penyerapan anggaran. Tingkat penyerapan anggaran Bappeda Kabupaten Bekasi menurun dari 87,69% pada tahun 2024 menjadi 82,63% pada tahun 2025. Pada tahun 2025, dari pagu anggaran sebesar Rp24.360.332.757, realisasi anggaran mencapai Rp20.129.654.775. Dengan demikian, terdapat penurunan tingkat penyerapan sebesar 5,06 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Perbedaan arah perkembangan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan capaian pada aspek perencanaan belum secara otomatis menghasilkan peningkatan penyerapan anggaran, sehingga terdapat tahapan lain yang perlu diperhatikan dalam menerjemahkan perencanaan menjadi realisasi anggaran.

Capaian tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara hasil pengukuran kinerja secara umum dengan kondisi integrasi perencanaan pada tingkat pelaksanaan. Di satu sisi, indikator pengendalian pembangunan menunjukkan hasil yang sangat baik. Namun di sisi lain, beberapa indikator yang menggambarkan keterhubungan antara dokumen perencanaan, program, kegiatan, dan sasaran pembangunan belum menunjukkan hasil yang optimal. Temuan ini

menjadi penting karena integrasi perencanaan merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan terarah.

Permasalahan tersebut juga tercermin dalam hasil evaluasi internal Bappeda Kabupaten Bekasi. Dalam laporan kinerja instansi disebutkan bahwa pemanfaatan pohon kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan belum berjalan secara optimal. Selain itu, identifikasi Critical Success Factor (CSF) belum sepenuhnya dilakukan secara logis dan sistematis. Kondisi tersebut mengakibatkan hubungan antara tujuan strategis, indikator kinerja, program, dan kegiatan belum sepenuhnya tersusun secara selaras. Akibatnya, dokumen perencanaan yang telah disusun belum selalu mudah diterjemahkan ke dalam pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.

Keadaan ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi Bappeda Kabupaten Bekasi tidak terletak pada penyusunan dokumen perencanaan semata. Tantangan yang lebih penting adalah bagaimana memastikan bahwa perencanaan yang telah disusun dapat diimplementasikan secara konsisten melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, tidak jarang suatu organisasi mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang baik dan memenuhi berbagai indikator administratif, tetapi masih menghadapi kendala ketika perencanaan tersebut diterjemahkan ke dalam pelaksanaan anggaran.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan dalam kerangka Performance-Based Budgeting (PBB). Pendekatan ini menempatkan perencanaan, pelaksanaan, dan capaian anggaran sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Kualitas perencanaan yang baik seharusnya mampu mendorong pelaksanaan program yang efektif, yang pada akhirnya tercermin pada pencapaian target anggaran maupun kinerja pembangunan. Namun apabila keterhubungan tersebut tidak berjalan dengan baik, maka anggaran berpotensi hanya berfungsi sebagai instrumen administratif tanpa memberikan dampak yang optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan (Špaček, 2019).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara perencanaan dan penyerapan anggaran, namun menunjukkan hasil yang beragam. Engkus et al. (2020) menemukan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap

penyerapan anggaran dengan kontribusi yang cukup besar. Sementara itu, Azlina & Nurulita, (2020) menyoroti bahwa struktur belanja lebih dominan dalam menentukan tingkat penyerapan dibandingkan kualitas perencanaan itu sendiri. Di sisi lain, penelitian oleh (Pramono, 2024) menunjukkan bahwa hubungan antara perencanaan dan kinerja organisasi bersifat simultan dan kompleks. Namun demikian, Radjak & Humolungo, (2022) menemukan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak selalu berperan signifikan dalam menjembatani hubungan antara perencanaan dan realisasi anggaran.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara perencanaan dan penyerapan anggaran masih menjadi isu yang perlu dikaji lebih lanjut. Hingga saat ini, penelitian yang menempatkan pelaksanaan anggaran sebagai mekanisme yang menjelaskan bagaimana perencanaan dapat menghasilkan penyerapan anggaran masih relatif terbatas, khususnya pada organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi utama dalam perencanaan pembangunan. Padahal, proses pelaksanaan merupakan tahap yang menentukan apakah rencana yang telah disusun benar-benar dapat diwujudkan melalui kegiatan dan penggunaan anggaran.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran dengan mempertimbangkan pelaksanaan anggaran sebagai variabel mediasi pada Bappeda Kabupaten Bekasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan penyerapan anggaran dalam pengelolaan pembangunan daerah. Selain memberikan kontribusi empiris bagi penguatan tata kelola anggaran daerah, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai *Performance-Based Budgeting* dan implementasi kebijakan publik pada sektor pemerintahan daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada analisis hubungan antara perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan penyerapan anggaran dalam perspektif *performance-based budgeting* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi. Secara spesifik, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh perencanaan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran di Bappeda Kabupaten Bekasi?
2. Seberapa besar pengaruh perencanaan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan anggaran di Bappeda Kabupaten Bekasi?
3. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran di Bappeda Kabupaten Bekasi?
4. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan anggaran memediasi secara signifikan pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran di Bappeda Kabupaten Bekasi?

Rumusan masalah ini disusun untuk menguji hubungan struktural antarvariabel secara kuantitatif, sekaligus menganalisis mekanisme mediasi yang menjelaskan bagaimana perencanaan anggaran diterjemahkan menjadi penyerapan anggaran melalui proses pelaksanaan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan penyerapan anggaran dalam perspektif *performance-based budgeting* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

- a) Menganalisis pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran di Bappeda Kabupaten Bekasi.
- b) Menganalisis pengaruh perencanaan anggaran terhadap pelaksanaan anggaran di Bappeda Kabupaten Bekasi.
- c) Menganalisis pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran di Bappeda Kabupaten Bekasi.
- d) Menganalisis peran pelaksanaan anggaran sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara perencanaan anggaran dan penyerapan anggaran di Bappeda Kabupaten Bekasi.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antarvariabel secara kuantitatif, tetapi juga untuk menjelaskan mekanisme bagaimana perencanaan anggaran diterjemahkan menjadi penyerapan anggaran

melalui proses pelaksanaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam menjelaskan fenomena kesenjangan antara perencanaan dan penyerapan anggaran (*implementation gap*) dalam pengelolaan keuangan daerah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian *performance-based budgeting*, dengan menekankan pentingnya keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan penyerapan anggaran sebagai satu kesatuan proses kinerja anggaran.
- Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam menjelaskan mekanisme hubungan antara perencanaan anggaran dan penyerapan anggaran melalui peran pelaksanaan anggaran sebagai variabel mediasi, yang masih relatif terbatas dalam kajian sebelumnya.
- Selain itu, penelitian ini turut memperkuat pemahaman mengenai fenomena *implementation gap* dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu kesenjangan antara kualitas perencanaan yang tinggi dan efektivitas penyerapan anggaran di lapangan.

2. Kegunaan Praktis

- Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Bappeda Kabupaten Bekasi sebagai dasar evaluasi yang lebih spesifik terhadap proses pengelolaan anggaran, khususnya dalam mengidentifikasi titik lemah pada tahap pelaksanaan yang berpotensi menghambat optimalisasi penyerapan anggaran.
- Penelitian ini juga dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi peningkatan kinerja anggaran yang lebih terintegrasi, dengan memperkuat

keterkaitan antara perencanaan dan implementasi program sesuai dengan prinsip *performance-based budgeting*.

- Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain dalam mengembangkan sistem perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada pencapaian kinerja yang substantif dan terukur.

E. Kerangka Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada perspektif administrasi publik modern, khususnya dalam kerangka *performance-based budgeting* (PBB), yang menekankan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja anggaran (Špaček, 2019). Dalam pendekatan ini, anggaran tidak hanya dipandang sebagai instrumen alokasi sumber daya, tetapi juga sebagai alat manajemen kinerja yang menghubungkan input, proses, dan output secara terintegrasi.

Secara konseptual, penelitian ini juga mengacu pada fenomena *implementation gap*, yaitu kesenjangan antara kualitas perencanaan yang tinggi dengan efektivitas pelaksanaan dan penyerapan anggaran di lapangan. Dalam konteks ini, pelaksanaan anggaran menjadi mekanisme kunci yang menjembatani perencanaan dengan penyerapan anggaran.

Penelitian ini melibatkan tiga variabel utama, yaitu:

1. Perencanaan Anggaran (X)

Perencanaan anggaran merupakan proses penyusunan dokumen anggaran yang mencakup penetapan program, kegiatan, indikator kinerja, serta alokasi sumber daya yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah. Menurut (Špaček, 2019), perencanaan anggaran yang berkualitas ditandai oleh kejelasan tujuan, konsistensi dengan dokumen perencanaan strategis (RPJMD), serta integrasi antarprogram dan kegiatan. Perencanaan yang baik diharapkan mampu meminimalkan deviasi antara target dan penyerapan anggaran.

2. Pelaksanaan Anggaran (Z – Variabel Mediasi)

Pelaksanaan anggaran merupakan tahap implementasi dari rencana anggaran yang telah disusun, yang mencakup proses administrasi, koordinasi antarunit kerja, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan. Dalam perspektif

PBB, pelaksanaan anggaran berperan sebagai mekanisme utama yang menentukan apakah perencanaan dapat diterjemahkan menjadi output dan outcome yang nyata. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan anggaran sangat dipengaruhi oleh ketepatan waktu, kepatuhan terhadap dokumen anggaran, serta kualitas monitoring dan evaluasi.

3. Penyerapan Anggaran (Y)

Penyerapan anggaran merupakan indikator kinerja yang mencerminkan tingkat realisasi anggaran terhadap pagu yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran tidak hanya dilihat dari besarnya realisasi, tetapi juga dari ketepatan waktu dan kesesuaian dengan target program. Dalam kerangka PBB, tingkat penyerapan anggaran mencerminkan sejauh mana perencanaan dan pelaksanaan anggaran mampu menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Dalam kerangka *performance-based budgeting*, perencanaan anggaran yang berkualitas seharusnya memiliki hubungan positif dengan penyerapan anggaran. Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak selalu bersifat langsung, melainkan dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan anggaran sebagai tahap implementasi (Špaček, 2019).

Dengan demikian, pelaksanaan anggaran diposisikan sebagai variabel mediasi yang menjembatani hubungan antara perencanaan dan penyerapan anggaran. Model ini memungkinkan pengujian tidak hanya hubungan langsung, tetapi juga mekanisme bagaimana perencanaan diterjemahkan menjadi realisasi anggaran.

Berdasarkan hal tersebut, Untuk memperjelas alur penelitian, digunakan pendekatan sistem yang terdiri dari:

1. Input (Masalah)

Meskipun capaian IKPPD Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan, hasil evaluasi kinerja menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target. Kondisi tersebut terutama terlihat pada indikator yang berkaitan dengan integrasi perencanaan pembangunan. Tingkat Integrasi Perencanaan Daerah yang ditargetkan sebesar 100% hanya terealisasi sebesar 54,18%. Sementara itu,

Tingkat Integrasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mencapai 57,72%, dan Tingkat Integrasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mencapai 71,34%. Selain itu, tingkat penyerapan anggaran Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2024 mencapai 87,69% dari total pagu anggaran sebesar Rp29.762.474.226. Meskipun menunjukkan capaian yang relatif tinggi, masih terdapat anggaran sebesar Rp3.663.474.446 atau 12,31% yang belum terealisasi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan penyerapan anggaran masih perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan daerah.

2. Proses (Analisis)

Penelitian ini menguji hubungan kausal antara:

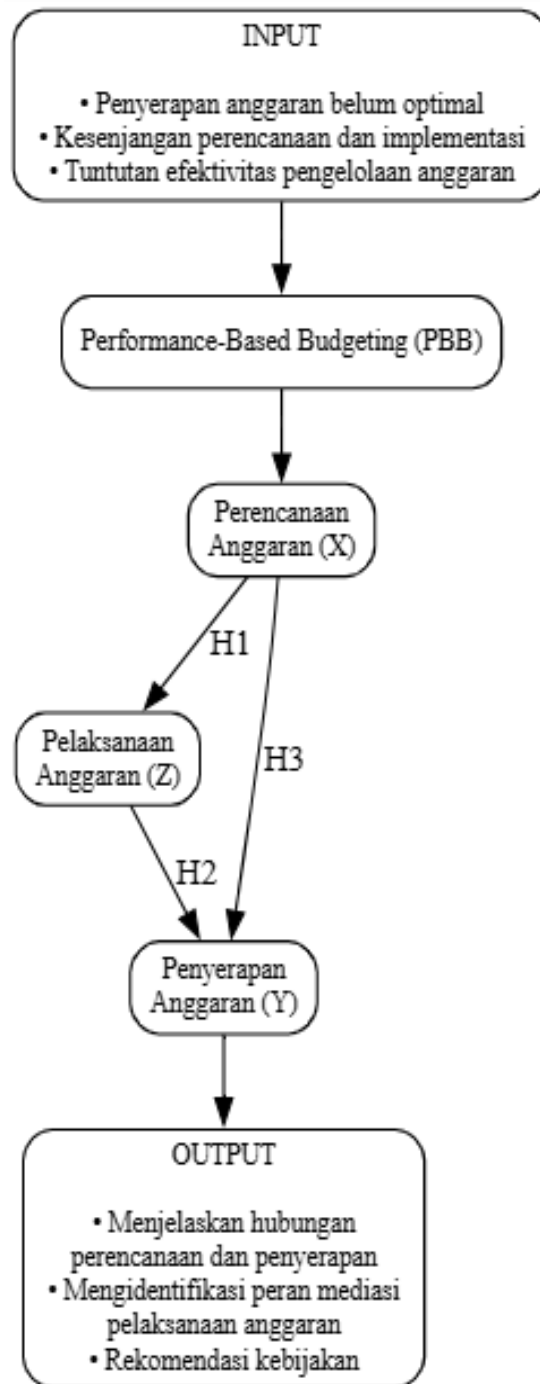
- perencanaan anggaran (X),
- pelaksanaan anggaran (Z), dan
- penyerapan anggaran (Y),

baik secara langsung maupun tidak langsung. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui teknik regresi atau *Structural Equation Modeling* (SEM) untuk menguji pengaruh dan peran mediasi variabel pelaksanaan anggaran.

3. Output (Tujuan/Hasil)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme hubungan antara perencanaan dan penyerapan anggaran melalui pelaksanaan anggaran. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam menjelaskan fenomena kesenjangan antara perencanaan dan realisasi anggaran, serta menjadi dasar dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Gambar 1. 1 Kerangka Penelitian



F. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran yang telah disusun, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1) Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

H0: Perencanaan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran di Bappeda Kabupaten Bekasi.

H1: Perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran di Bappeda Kabupaten Bekasi.

2) Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Pelaksanaan Anggaran

H0: Perencanaan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan anggaran di Bappeda Kabupaten Bekasi.

H1: Perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan anggaran di Bappeda Kabupaten Bekasi.

3) Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

H0: Pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran di Bappeda Kabupaten Bekasi.

H1: Pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran di Bappeda Kabupaten Bekasi.

4) Peran Mediasi Pelaksanaan Anggaran

H0: Pelaksanaan anggaran tidak memediasi secara signifikan hubungan antara perencanaan anggaran dan penyerapan anggaran di Bappeda Kabupaten Bekasi.

H1: Pelaksanaan anggaran memediasi secara signifikan hubungan antara perencanaan anggaran dan penyerapan anggaran di Bappeda Kabupaten Bekasi.